

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang terdapat di Bab IV, maka dapat disimpulkan dalam laporan magang :

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis yang bertujuan untuk pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Evaluasi Implementasi SAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dengan tujuan untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Terdapat 8 tahap dalam proses Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 :

- 1) Keluarnya Surat Kementerian PANRB Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
  - 2) Pengumpulan Data dan Informasi
  - 3) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi
  - 4) Penilaian Pada Lembar Kerja Evaluasi
  - 5) Pengumpulan Lembar Kerja Evaluasi
  - 6) Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP
  - 7) Penentuan Predikat SAKIP Pemerintah Daerah
  - 8) Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
4. Pada tahap Rapat persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 terdapat hambatan yaitu rapat yang dilaksanakan ini diadakan sangat mendadak Hal ini menyebabkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak siap dengan materi yang akan disampaikan dan banyak Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang datang terlambat sehingga pelaksanaan rapat juga mengalami penundaan hingga kurang lebih satu setengah jam.
5. Pada tahap penentuan predikat SAKIP atau yang sering disebut dengan tahap evaluasi mendalam Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 terdapat hambatan yaitu beberapa Organisasi Perangkat Daerah sering melakukan revisi yang berulang pada waktu yang mendadak sehingga terlambat dalam pengumpulan materi tersebut, adanya keterlambatan tersebut juga menghambat pekerjaan staf bagian organisasi dan tata laksana.

**B. Saran :**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran terhadap pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

1. Info tentang undangan diberikan lebih dulu melalui media sosial sambil undangan fisiknya diproses untuk mempercepat informasi tersebut sampai pada yang diundang.
2. Monitoring harus rutin dilakukan dan pemberian surat peringatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlambat mengumpulkan data sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.